

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Pramadanty Darmansyah, Mulya Sahrina Auliyanti, & Zulviana Nur Azizah. (2025). Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 330–340.
- Adil Al Hasan. (205 C.E., March 12). Anggota DPR Usul Masukkan Klausul Larangan PHK Menjelang Lebaran dalam UU Ketenagakerjaan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/anggota-dpr-usul-masukkan-klausul-larangan-phk-menjelang-lebaran-dalam-uu-ketenagakerjaan-1218624>.
- Agus Wijaya, Solechan, & Suhartoyo. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, & Anita Gladina Ayu Nurhayati. (2020). Kelemahan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 3(2), 213–222.
- Amanda, Rizki, and Yuana Tri Utomo. "Mencari Solusi Problem Perindustrian Indonesia: Studi Kasus PT. Sritex Tahun 2024." *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 3.5 (2025): 56-66.
- Arbendi. (2019). Perlindungan Hukum Hak-hak Lainnya Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *Jurnal Wacana Hukum*, 24(2), 55–71.
- Atang Hidayat. (2017). Hak Tenaga Kerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 23–32.
- Atmoko, Dwi, and Lindri Purbowati. "Analisa Perlindungan Hukum Tenaga Pada Sektor Pariwisata Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Krisis Ekonomi Dan Wabah Pandemi." *Journal of Mandalika Literature* 6.2 (2025): 644-652.
- Alandi, Hansen & Dian Ety Mayasari, "Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja," *Jurnal Hukum lus Publicum* 4 No. 2 (2023)
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

- Asyhadie, Zaeni and Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketengakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2019.
- Bagas Dika Anggiat, Wira Franciska, & Marni Mustafa. (2023). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja atas Suatu Perusahaan yang Dinyatakan Pailit yang Berimplikasi Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Diberikan Pesangon. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3804–3813.
- Barus, Esiska. " Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang di lakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan undang - undang." (2024).
- Bisnis.com. "Sejarah Kejayaan Sritex hingga Terjerat Pailit & Berakhir PHK Massal." Diakses 28 Februari 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250228/257/1843396/sejarah-kejayaan-sritex-hingga-terjerat-pailit-berakhir-phk-massal>
- Bisnis.com. "Sritex (SRIL) dan Belasan Pabrik Tekstil yang PHK Massal 2024, Ini Daftarnya." Diakses 27 Oktober 2024.
- Dermawan, Faizal Aditya, and Bagus Sarnawa. "Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proes Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial." *Media of Law and Sharia* 2.3 (2021): 272-287.
- Detik.com. "Fakta-fakta Tutupnya PT Sritex hingga Ribuan Buruh Di-PHK." Diakses 28 Februari 2025.
- Detik.com. "PT Sritex Dibayangi Badai PHK Usai Kurator Ogah Terbitkan Going Concern." Diakses 14 Januari 2025.
- Delycia Anwar Rannu & Rasji. (2023). Analisis Hukum Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. *Journal of Social Science Research*, 3(5), 564–570.
- Edy Sony & Nugrah Gables Manery. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Pembagian Hutang Harta Pailit. *Pattimura Legal Journal*, 2(1), 30–42.
- Endang Istanti. (2025, March 9). 1.291 Eks Pekerja Sritex tak Dapat JKP, Ini Alasannya. *inilahJateng*. <https://inilahjateng.com/1-291-eks-pekerja-sritex-tak-dapat-jkp-ini-alasannya/>
- Faisal, Saprudin, & Yulia Qamariyanti. (2023). Kedudukan Pekerja untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1889–1900.

- Jabbal Apriawal. (2022). Resiliensi Pada Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan*, 1(1), 27–38.
- Han Revanda. (2025, March 13). Gelombang PHK di Awal Pemerintahan Prabowo: Sritex, Yamaha, hingga Nike. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/gelombang-phk-di-awal-pemerintahan-prabowo-sritex-yamaha-hingga-nike-1218991>
- Hendrik Khoirul Muhid. (2025, March 3). Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2018.
- Harahap, A., Ramadhan, K., Milen, S., Anshory, R., & Harahap, M. Islam. (2023). Perlindungan hukum bagi pekerja yang diberhentikan dengan tidak dibayar pesangonnya. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2), 52–56
- Harahap, Fazar Siddik, Arif Rahman, and Nurarafah Nurarafah. "Analisis Yuridis Penyelesaian Pembayaran Utang Kepada Kreditur Atas Pailitnya PT. Sri Rejeki Isman, TBK (SRITEX)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8.3 (2025).
- Hartini, Sri. "Kedudukan Pekerja sebagai Kreditur dalam Kepailitan Perusahaan." *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan* Vol. 15 No. 2 (2021): 45-62.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Is, Muhamad Sadi and Sobandi. *Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Khakim, Abdul. *Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Luthvi Febryka Nola. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(2), 149–166.
- Mayasari, Vitria Farish, and Rusdianto Sesung. "Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum." *Journal Evidence Of Law* 4.2 (2025): 689-698.

- Manullang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mantili, Rai. "Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6.1 (2021): 47-65.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Maswandi, Maswandi. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.1 (2017): 36-42.
- Mohamad Final Daeng. (2025, March 5). Kurator Sritex Bayarkan Gaji Karyawan, Pesangon Masih Tunggu Penjualan Aset. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/kurator-sritex-bayarkan-gaji-karyawan-pesangon-masih-tunggu-penjualan-aset>
- Muhamad Azhar. "Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan" Semarang, Tahun 2015 hlm. 81
- Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 83–85.
- Naelayara, Siti Amara & Gunardi Lie, "Pemberian Uang Pesangon yang diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak : Dasar Hukum beserta Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5 No. 2 (2024): 865.
- Ntobuo, Deby Fatria, Weny Almoravid Dunga, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan yang di PHK." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3.1 (2025): 22-31.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg tentang Kepailitan PT Sritex
- Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 97.

- Radar Solo. "5 Fakta dan Sikap Kurator dalam Penanganan Pailit Sritex." Diakses 2 Agustus 2025.
- Ray, S., Das, J., Pande, R., & Nithya, A. (2024). Tinjauan yuridis mekanisme pembayaran pesangon sebagai hak pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). [Judul Jurnal], 8(8), 195–222.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.
- Rizki Amanda & Yuana Tri Utomo. (2025). Mencari Solusi Problem Perindustrian Indonesia: Studi Kasus PT. Sritex Tahun 2024. *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 3(5), 55–66.
- Romensy Augustino & Ihsanuddin. (2025, March 5). Tiga Perusahaan Berminat Sewa Aset PT Sritex. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/05/193319578/tiga-perusahaan-berminat-sewa-aset-pt-sritex>
- Rudi Febrianto Wibowo & Ratna Herawati. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 109–120.
- Sadath M. Nur. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja atas Perusahaan yang Dinyatakan Pailit karena Pandemi Covid-19. *Journal of Science and Economics Research*, 4(1), 081–092.

- Safitri, Arum Eka, et al. "Motivasi Kerja Ditinjau dari Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi dan Lingkungan Kerja; (Studi Kasus pada PT Sritex TBK)." *PARADIGMA* 22.01 (2023).
- Setiawan, I. P. Y., & Priyanto, I. M. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja, 9(7), 1174–1187.
- Simarmata, Michael Kalep dan Rasji, "Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dengan Perjanjian Kerja Kemitraan menurut Hukum Ketenagakerjaan," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 5(2024): 6
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan*. Kencana.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 122.
- Tempo.co. "PHK Massal Terjadi di PT Sritex yang Pailit, Ini Prosedur PHK Karyawan Menurut UU Cipta Kerja." Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/phk-massal-terjadi-di-pt-sritex-yang-pailit-ini-prosedur-phk-karyawan-menurut-uu-cipta-kerja-1215095>
- Uwiyono, Aloysius. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 109–120.

- Wijayanti, Asri. "Perlindungan Hak Pekerja dalam Kepailitan Perusahaan: Studi Kasus PT Nyonya Meneer." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 12 No. 3 (2022): 78-95
- Yunus, Yudin, et al. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 727-734.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Zahra, Tazkiatun Nafs Az, and Adnan Hamid. "Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Dalam Kepailitan." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 3.1 (2023): 236-255.

LAMPIRAN